



**SALINAN**

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 44 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN BUPATI  
KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas maka UPTD-UPTD yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perlu dievaluasi dan dicabut;
  - b. bahwa sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 060/9187/OTDA Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) guna penyesuaian dan pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipandang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu dilakukan evaluasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Bupati Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78/ PMK.06/ 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN  
BEBERAPA PERATURAN BUPATI KABUPATEN SERUYAN.**

**Pasal 1**

Peraturan Bupati yang dinyatakan dicabut, antara lain:

1. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan;
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Benih Pembantu (BBP) Holtikultura, Balai Benih Pembantu (BBP) Padi dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Seruyan;
3. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan;

4. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan;
5. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Seruyan di Kabupaten Seruyan;
6. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seruyan;
7. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pasar Daerah di Komplek Pasar Saik dan Pasar Tengah Kual2a Pembuang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Seruyan;
8. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan Kabupaten Seruyan;
9. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan;
10. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan;
11. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Kuala Pembuang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seruyan;
12. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Laboratorium dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan;
13. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan.

## **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal, 04 Desember 2017



Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal, 06 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**



**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017 NOMOR 44**